Pertamina Bantah Ketua SPI Dimutasi

PT Pertamina (Persero) membantah Ketua Satuan Pengawasan Intern L Budi Djatmiko dimutasi menyusul bocornya temuan dugaan penyimpangan proyek pabrik pelumas di Gresik, Jawa Timur.

Juru bicara Pertamina M Harun di Jakarta, Minggu mengatakan, Budi Djatmiko tetap berada di posisinya sekarang yakni sebagai Ketua SPI Pertamina.

"Tidak ada pemutasian Pak Budi. Saya baru saja ketemu beliau dan tetap mengepalai audit sebagai bagian 'good corporate governance' (GCG)," katanya.

Menurut dia, tugas SPI begitu penting yakni mengawasi atau melihat sejauh mana proyek sudah sesuai kontrak di awal.

Bahkan, lanjutnya, Budi Djatmiko berencana mengubah sistem audit dari sebelumnya dilakukan hanya di akhir menjadi sejak proyek berjalan hingga beroperasi.

"Jadi, proyek akan dikawal sejak awal," katanya. Harun juga menepis kekhawatiran adanya konflik kepentingan Triharyo Soesilo sebagai Komisaris Pertamina dan mantan Dirut PT Rekayasa Industri yang mengerjakan proyek pabrik pelumas tersebut.

Menurut dia, Pertamina mempunyai regulasi yang berisi rambu-rambu pencegahan terjadinya kemungkinan seseorang melakukan konflik kepentingan.

"Pak Hengky juga tentunya akan memisahkan antara kepentingan internal Pertamina dan komisaris," katanya.

Ia menambahkan, semua karyawan Pertamina menandatangani pakta integritas yang melarang praktik yang tidak sesuai GCG atau tata kelola perusahaan yang baik seperti konflik kepentingan.

"Saya juga tidak boleh misalkan mendirikan atau bekerja di perusahaan PR

(public relation)," ujarnya.

Namun, Direktur Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara setuju penonaktifan sementara Komisaris Pertamina Triharyo Soesilo sampai permasalahan dugaan penyimpangan tersebut selesai.

"Potensi konflik kepentingan dalam kasus ini cukup besar," katanya.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP, M Romahurmuziy sebelumnya meminta Kementerian BUMN menonaktifkan sementara Triharyo Soesilo.

Ia mengkhawatirkan, adanya kemungkinan konflik kepentingan saat proses penyelesaian dugaan penyimpangan tersebut mengingat Triharyo yang saat proyek pabrik pelumas di Gresik dibangun tahun 2007-2009 menjabat Dirut Rekind.

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto meminta, persoalan tersebut segera diselesaikan.

"Sebagai sesama BUMN perlu mencari jalan keluar terbaik dan perlu pula dicari tolak ukur kesalahannya, apakah pada peralatan utama atau proses lainnya," katanya.

Ia juga mengatakan, perlu diperhatikan apakah proyek sudah diserahterimakan dan sudah ada sertifikat penerimaan yang ditandatangani Pertamina.

Marwan melanjutkan, selain penonaktifan, sebenarnya jauh lebih penting adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menindaklanjuti temuan SPI Pertamina tersebut.

Audit BPK atau BPKP itu, selain akan memperjelas kasusnya, juga mencegah intervensi seperti kekhawatiran banyak pihak.

"DPR bisa meminta BPK segera turun

tangan," katanya. Apalagi, lanjutnya, temuan itu menyangkut potensi kerugian negara.

Marwan juga berharap, tindak lanjut BPK atau BPKP tersebut menjadi contoh bagi semua temuan dugaan penyimpangan dalam suatu kegiatan atau proyek di Pertamina maupun BUMN lain seperti PT PLN (Persero).

"Kasus ini bisa menjadi contoh penuntasan secara profesional dengan melibatkan lembaga dari luar," ujarnya.

Keekonomian

Sementara, Harun juga mengatakan, usulan angka keekonomian proyek pabrik pelumas tersebut merupakan potensi keuntungan yang dihitung berdasarkan asumsi-asumsi tertentu seperti harga, bunga, dan lama proyek.

"Kalau proyek mundur dan tidak sesuai kinerja maka akan mengurangi potensi yang didapat," katanya. Karenanya, menurut dia, perlu dilakukan audit untuk melihat sejauh mana kinerja proyek.

Kalau masih belum sesuai rancangan awal, lanjutnya, maka Pertamina meminta Rekind melakukan perbaikan agar sesuai dengan angka potensial yang dihitung awal. "Kalau kinerja proyek hanya 58 persen, tentunya kita yang dirugikan," ujarnya.

Karenanya, Rekind diminta melakukan perbaikan sesuai prinsip GCG dan pada 2010 didapat kenaikan kinerja proyek hingga 80 persen. Selanjutnya, Rekind diberikan waktu sampai 31 Maret 2011 untuk mencapai 100 persen.

"Namun demikian, kalau setelah diberikan waktu, tidak juga bisa diperbaiki, kita denda," katanya.

Selbelumnya, Triharyo mengatakan, besaran "net present value" (NPV), "internal rate of return," "profitability in-

dex," dan "payback period" yang diusulkan Pertamina saat itu memang terlalu tinggi.

"Kami sebagai komisaris Pertamina harus introspeksi, kenapa angkanya demikian tinggi," katanya.

Ia mencontohkan, NPV yang ditetapkan 508,59 juta dolar AS terlalu tinggi dibandingkan nilai proyek yang hanya 22 juta dolar AS.

"Kalau dihitung bunga per tahun 10 persen, maka dengan nilai proyek 22 juta dolar akan didapat NPV maksimal antara 26-27 juta dolar setelah dua tahun. Tidak sampai 500 juta dolar," katanya.

Demikian pula dengan usulan IRR sebesar 75,1 persen, maka berarti uang kembali hanya dalam waktu satu tahun lebih.

Triharyo atau akrab disapa Hengky juga mengatakan, Rekind tidak lepas tangan atas kinerja pabrik pelumas di Gresik, Jatim yang belum optimal.

"Rekind diberi waktu sampai 31 Maret 2011 untuk menyempurnakan peralatan pabrik yang belum optimal," katanya.

Sebelumnya, temuan audit SPI Pertamina menyebabkan, proyek modernisasi pabrik pencampur pelumas (lube oil blending plant/LOBP) Gresik yang dikerjakan PT Rekayasa Industri tidak sesuai rancangan awal.

Sesuai dokumen memorandum tertanggal 23 Agustus 2010 bernomor R-081/J00000/2010-SO dari Kepala Satuan Pengawas Intern Pertamina, L Budi Djatmiko kepada Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, disebutkan, keekonomian proyek itu sulit mencapai rencana awal, dikarenakan realisasi produksi di bawah kapasitas desain.

Disebutkan pula, sejumlah unit LOBP tersebut tidak berfungsi optimal. (ant)